




3. Ikut berperan serta dalam sosialisasi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M), *testing tracing treatment* (3T), dan vaksin di warga Satuan Pendidikan;
4. Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan pada unit kerja masing-masing;
5. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*);
6. Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila diperlukan kepentingan dinas, **wajib hadir** di tempat kerja/Satuan Pendidikan;
7. Surat pemberitahuan ini ***mulai berlaku tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021*** dan akan ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan terbaru.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kulon Progo,



**ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19700514 199603 1 004

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Kulon Progo (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Kepala BKPP Kabupaten Kulon Progo.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6. **Arsip.**





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂ꧀ꦢꦫꦺꦴꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 8 / INSTR / 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK PENGENDALIAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Walikota Yogyakarta  
2. Bupati Sleman  
3. Bupati Bantul  
4. Bupati Kulon Progo  
5. Bupati Gunungkidul

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis mikro selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi COVID-19.

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
  1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
  6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.



- KETIGA : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Kalurahan dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan dibentuk Posko Kemantren/Kapanewon.
- KELIMA : Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan/Kalurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan/Kalurahan.
- KEENAM : Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kemantren/Kapanewon, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Kalurahan dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Kalurahan dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/Polri;
- d. kebutuhan penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada APBD DIY dan APBD Kabupaten/Kota; dan
- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD DIY/APBD Kabupaten/Kota/APBDes.

KEDELAPAN

: Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kalurahan dan Mitra Kalurahan lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Kalurahan maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KESEMBILAN

: PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work from Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work from Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;



- c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
  - 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
  - 2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- h. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan
- i. melakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

#### KESEPULUH

: Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi:

- a. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;

- b. mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/hand sanitizer;
- c. menjaga jarak antara 1 m (meter) sampai dengan 2 m (meter);  
dan
- d. mencegah terjadinya kerumunan yang berponsi menimbulkan penularan COVID-19.

- KESEBELAS : Untuk memperkuat kemampuan *tracking* dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive care unit*, maupun tempat isolasi atau karantina).
- KEDUABELAS : Untuk mencegah dan menghindarkan kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia).
- KETIGABELAS : Untuk mengoptimalkan Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten/Kota, Kemantren/Kapanewon maupun Kelurahan/Kalurahan sampai dengan Padukuhan/RW/RT dalam rangka penegakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
- KEEMPATBELAS : Menginstruksikan kepada Kelurahan/Kalurahan membentuk POSKO ditingkat Padukuhan/RW/RT dengan melibatkan Jaga Warga/Linmas dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.
- KELIMABELAS : Menginstruksikan kepada Kelurahan/Kalurahan untuk menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya.
- KEENAMBELAS : Melakukan pemantauan (*monitoring*) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.
- KETUJUHBELAS : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPANBELAS : Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat di wilayah masing-masing kepada Gubernur.



Instruksi Gubernur ini mulai berlaku mulai **23 Maret 2021** sampai dengan **5 April 2021** dan pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tanggal 8 Maret 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **22 MARET 2021**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten signature]*  
HAMENGKU BUWONO X



## BUPATI KULON PROGO

Wates, 22 Maret 2021

Kepada:

- Yth.: 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo.  
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Kulon Progo.  
3. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.  
di tempat

### SURAT EDARAN

Nomor 800/956

### TENTANG

#### **PERPANJANGAN PEMBATASAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka pelaksanaan sistem kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ditentukan sebagai berikut:

1. Sistem kerja pegawai dalam rangka pengendalian penyebaran *Covid-19* **diperpanjang sampai dengan 5 April 2021;**
2. Menerapkan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan perkantoran, meliputi:
  - a. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
  - b. mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
  - c. menjaga jarak antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter; dan
  - d. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*.
3. Ikut berperan serta dalam sosialisasi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M), *tracking tracing treatment* (3T), dan vaksin di masyarakat.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI KULON PROGO,

Drs. H. SUTEDJO

PARAF KOORDINASI